

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) memiliki suatu inovasi program pemberdayaan keluarga yang bernama Gelari Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Ekonomi). Gelari Pelangi berupaya untuk bisa menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tingkat rumah tangga, meningkatkan keterampilan kemampuan ekonomi produktif, dan juga mendorong terbentuknya unit usaha ekonomi seperti koperasi.

Koperasi menjadi salah satu instrumen alternatif yang berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Koperasi berperan sebagai wadah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai implementasi dari Pancasila sila ke 5 (lima) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui koperasi, anggota dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, mengelola sumber daya bersama, serta mengakses layanan keuangan yang mungkin sulit dijangkau secara individu sehingga dapat menciptakan keadilan sosial yang nyata.

Menurut Mohammad Hatta yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia, koperasi bukan semata – mata hanya badan usaha yang mencari keuntungan atau upaya pemberdayaan masyarakat tetapi juga bisa menjadi wadah untuk meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama serta menjadi sarana pendidikan masyarakat. Berdasarkan Pasal (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM mengatakan adanya 127.000 unit koperasi aktif yang tercatat pada tahun 2019, dan angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 130.119 unit koperasi tercatat pada tahun 2023.²

Koperasi memiliki kedudukan yang strategis bagi para anggotanya dalam mencapai tujuan ekonomis yang akan berdampak kepada masyarakat luas. Peran aktif masyarakat serta kesadarannya untuk berkoperasi merupakan kunci awal dari suksesnya keberlangsungan suatu koperasi. Koperasi juga memiliki karakteristik sebagai sistem sosial ekonomi yang menunjukkan bahwa koperasi sesungguhnya merupakan suatu bisnis yang memiliki misi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya.³

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha bisa membantu terhadap peningkatan pendapatan dan juga pengembangan potensi dari suatu usaha yang ada di dalam masyarakat seperti pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Terutama dalam koperasi simpan pinjam yang bisa menjadi modal awal untuk masyarakat dalam pengembangan usaha yang dimilikinya.

PKK Pokja II Kelurahan Lubang Buaya merupakan wilayah yang terpilih sebagai *pilot project* dari program Gelari Pelangi (Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi) se-Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam program Gelari Pelangi memiliki 5 program kerja salah satu diantaranya yaitu pembentukan atau pengembangan koperasi dalam naungan PKK Pokja II. Dalam PKK juga memiliki sepuluh program pokok kerja yang dijadikan dasar, salah satunya

¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992).

² VOI.id. (2024). *Jumlah koperasi aktif hingga 2024 jadi 130.119*. Diakses dari https://voi.id/ekonomi/424057/jumlah-koperasi-aktif-hingga-2024-jadi-130-119#google_vignette.

³ Hanafi, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Gregeg Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(01), h.5

yatu pengembangan kehidupan berkoperasi⁴. Namun berdasarkan pengamatan awal, kegiatan koperasi diwilayah Kelurahan Lubang Buaya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Koperasi yang seharusnya menjadi wadah pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi justru mengalami stagnasi, partisipasi masyarakat menurun, dan tujuan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi belum tercapai secara optimal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengingat status kelurahan ini sebagai percontohan. Di wilayah Kelurahan Lubang Buaya baru memiliki suatu kumpulan pra koperasi saja.

Untuk membentuk suatu koperasi berkelanjutan tentunya perlu dilakukan tahap awal yang berupa pengembangan kelompok usaha kecil yang disebut dengan pra koperasi. Dalam proses pengembangan dari pra koperasi menuju koperasi berbadan hukum tentunya membutuhkan sinergi antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pengurus pra koperasi, dan juga PKK sebagai organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan penyadaran masyarakat akan manfaat dalam berpartisipasi dalam koperasi sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada prinsip keadilan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti kepada Bu Cicih selaku ketua pokja II PKK Kelurahan Lubang Buaya, saat ini di Kelurahan Lubang Buaya memiliki 9 pra koperasi yang berada dalam naungan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pokja II Kelurahan Lubang Buaya dan belum memiliki koperasi resmi yang berada dalam naungan PKK Kelurahan Lubang Buaya.

Pada tahap pembentukan pra koperasi tentunya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep koperasi, kurangnya kontribusi masyarakat dalam pembentukan koperasi, dan juga permasalahan terbatasnya modal. Hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan dari Zakiah selaku masyarakat Kelurahan Lubang Buaya yang belum mengikuti koperasi pada wawancara

⁴ Panglipusari, D. L., & Mardiana, F. (2019). Menumbuhkan Budaya Koperasi Dilingkungan Kelompok PKK Melalui Model Koperasi Simpan Pinjam. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, h.1129.

yang dilakukan oleh peneliti, menjelaskan bahwa kurangnya informasi dan juga sosialisasi yang diberikan kader PKK setempat mengenai koperasi di Lubang Buaya yang mengakibatkan kurangnya juga pengetahuan, minat, dan kepercayaan masyarakat terkait kontribusinya pada pra koperasi. Dalam hal ini sangat diperlukannya peran kader PKK khususnya pada pokja II sebagai pelaksana utama di lapangan. Kader PKK tidak hanya bertugas menjalankan program, tetapi juga menjadi motor penggerak yang menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan.

Menurut Bu Cicih, pada saat ini belum ada sosialisasi atau penyuluhan resmi yang dilakukan oleh PKK, Dinas Koperasi dan UMKM maupun *stakeholder* terkait mengenai pentingnya pembentukan koperasi di masyarakat, hal itu menjadi salah satu tantangan juga dalam penyampaian edukasi ke masyarakat. Hanya baru berupa himbauan dari Bu Cicih saat pertemuan rutin (pertin) PKK yang dilaksanakan satu bulan sekali kepada dasawisma, kader PKK RW, dan juga para pelaku UP2K mengenai seruan untuk segera membuat kelompok kecil sebagai awalan dari pembentukan pra koperasi.

Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat berperan sebagai seorang yang dapat memandu sebuah proses sekelompok orang dalam memahami tujuan bersama, dan membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Fasilitator juga perlu menyampaikan kegiatan pemberdayaan dengan cara melakukan komunikasi yang strategis dengan media yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar masyarakat bisa percaya dan berani dalam berdiskusi.⁵

PKK yang dikenal sebagai organisasi masyarakat penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi dalam menjalankan perannya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi seperti koperasi masih perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam. Maka dari itu kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengembangan pra koperasi ini, dimana kader PKK harus

⁵ Alim, S. W., Manullang, S. O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Ratnaningtyas, E. M., ... & Efendi, Y. (2022). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka. h.99.

menjadi jembatan yang menghubungkan atau melakukan pendekatan dan memberikan motivasi serta edukasi pada masyarakat dalam kontribusinya sebagai anggota aktif di pra koperasi, dan juga melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang pra koperasi yang berkolaborasi dengan PPKUKM (Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

Dengan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor – faktor yang memengaruhi peran kader PKK sebagai fasilitator untuk berpartisipasi dalam koperasi, sehingga dapat ditemukan akar masalah dan solusi yang lebih tepat sasaran. Tanpa pemahaman mendalam dari sudut pandang kader, upaya revitalisasi koperasi dalam program Gelari Pelangi akan sulit dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran kader PKK sebagai fasilitator untuk peningkatan partisipasi dalam koperasi di Kelurahan Lubang Buaya?
2. Bagaimana hambatan kader PKK sebagai fasilitator untuk peningkatan partisipasi dalam koperasi di Kelurahan Lubang Buaya?
3. Bagaimana pelaksanaan koperasi di Kelurahan Lubang Buaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada fokus penelitian yang telah disusun, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kader PKK sebagai fasilitator untuk peningkatan partisipasi dalam koperasi di Kelurahan Lubang Buaya
2. Untuk mengetahui hambatan kader PKK sebagai fasilitator untuk peningkatan partisipasi dalam koperasi di Kelurahan Lubang Buaya
3. Untuk mengetahui pelaksanaan koperasi di Kelurahan Lubang Buaya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang terkait. Secara khusus, manfaat penelitian ini terbagi menjadi kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, hambatan dan juga pelaksanaan oleh kader PKK dalam menjalankan perannya dalam memfasilitasi masyarakat untuk berkontribusi dalam koperasi.

b. Kegunaan Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran kader dalam menjalankan kehidupan berkoperasi sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi.

2. Kegunaan Teoritis

a. Memberikan referensi literatur tentang peran kader PKK sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan partisipasi dalam koperasi bagi penelitian selanjutnya.

b. Memberikan referensi model praktik bagi daerah lain yang ingin mengembangkan koperasi melalui peran serupa dari organisasi lain.

c. Memberikan perspektif baru tentang pentingnya organisasi masyarakat seperti PKK dengan koperasi sebagai bentuk usaha ekonomi kolektif.